

# QUO VADIS: PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA DI BIDANG PENDIDIKAN

Shofi Munawwir Effendi\*, Muhammad Anshori, Cipta Setiadi Bahri

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan

\* shofi.effendi@kemenkeu.go.id

Diajukan: 11 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## Abstrak

Sejatinya pembangunan talenta manusia Indonesia melalui pendidikan merupakan “investasi”. Wajah kualitas pendidikan Indonesia melalui skor Programme for International Student Assessment (PISA) maupun Human Capital Index (HCI) masih jauh dari kata cukup. Sumber pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dipandang belum mampu untuk mengatasi permasalahan pendidikan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Maka, diperlukan “investasi” secara literal untuk mendorong perbaikan kualitas dan kuantitas pendidikan secara terukur dan berkelanjutan. Sejak tahun 2010, pemerintah Indonesia mencanangkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional menggunakan mekanisme dana abadi (*endowment fund*) melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Beberapa waktu lalu, pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai badan *sovereign wealth fund*, menandai langkah strategis pemerintah dalam mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, sebetulnya pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga *sui generis sovereign wealth fund*. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai arah pengelolaan maupun cara mengoptimalkan investasi negara, khususnya di bidang pendidikan. Secara normatif, penelitian ini disusun dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan dibutuhkannya peran *sovereign wealth fund* untuk mendukung pendanaan pendidikan dan suatu urgensi penguatan terhadap lembaga pengelola *endowment fund* di bidang pendidikan. Kolaborasi strategis antara *sovereign wealth fund* dengan *endowment fund* dipandang perlu dalam rangka pengentasan permasalahan pendidikan di Indonesia.

**Kata kunci:** Investasi, Pendidikan, *Sovereign Wealth Fund*.

## Abstract

*In essence, developing Indonesia's human capital through education is an “investment.” The quality of Indonesian education, as measured by the Programme for International Student Assessment (PISA) and the Human Capital Index (HCI), is still far from sufficient. Funding sources through the State Revenue and Expenditure Budget are considered insufficient to address education issues in the short, medium, and long term. Therefore, a literal “investment” is needed to drive measurable and sustainable improvements in the quality and quantity of*



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

education. Since 2010, the Indonesian government has launched the Dana Pengembangan Pendidikan Nasional using an endowment fund mechanism through the Indonesia Endowment Fund for Education Agency (LPDP). Some time ago, the government launched the Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) as a sovereign wealth fund agency, marking a strategic step by the government in consolidating and optimizing government investment to support national economic growth. In 2020, the government actually formed the Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA) as a sui generis sovereign wealth fund agency. Therefore, this study aims to assess the direction of management and ways to optimize state investments, particularly in the education sector. Normatively, this study was conducted using a conceptual, legislative, and comparative approach. The results of the study show the need for the role of sovereign wealth funds to support funding in education and the urgency of strengthening endowment fund management institutions in the education sector. Strategic collaboration between sovereign wealth funds and endowment funds is considered necessary in order to overcome educational problems in Indonesia.

**Keywords:** *Investment, Education, Sovereign Wealth Fund.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Immanuel Kant berpandangan bahwa pendidikan merupakan hal fundamental dalam mencapai kehidupan yang layak.<sup>1</sup> Sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni "...mencerdaskan kehidupan bangsa", setiap warga negara berhak atas pendidikan sebagai hak dasar individu sekaligus hak konstitusional, maka secara *argumentum a contrario* negara wajib memenuhi hak tersebut.<sup>2</sup> Jaminan dan penghormatan terhadap hak pendidikan selanjutnya diamanahkan melalui Pasal 31 UUD NRI 1945.<sup>3</sup> Maka, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak pendidikan merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Immanuel Kant, *Kant on Education (Über Pädagogik)*, translator by Annette Churton, introduction by C.A. Foley Rhys Davids, (Boston: D.C. Heath and Co., 1900) h.11-13.

<sup>2</sup> I D. G. Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): h.52, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>.

<sup>3</sup> Bahwa Pasal 31 UUD NRI 1945 berbunyi:

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persamaan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pendidikan guna mencetak talenta manusia unggul.<sup>5</sup> Berdasarkan penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 2022<sup>6</sup> menunjukkan hasil rata-rata untuk ketiga mata pelajaran berupa matematika, membaca, dan sains terhadap anak-anak berusia 15 (lima belas) tahun di Indonesia terjadi penurunan (*learning loss*) mencapai 12-13 poin dibandingkan tahun 2018.<sup>7</sup> Sedangkan, berdasarkan laporan Human Capital Index (HCI) Bank Dunia tahun 2020, skor Indonesia hanya sebesar 0,54 dan menempati ranking 96 dari 175 negara.<sup>8</sup> Skor tersebut dapat dimaknai bahwa setiap anak yang lahir di Indonesia diperkirakan hanya dapat mencapai 54 persen dari potensi produktivitasnya pada kondisi ideal. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terjadi peningkatan kualitas secara signifikan terhadap pendidikan di Indonesia.

Sebagai suatu investasi jangka panjang bagi negara, pendanaan terhadap pendidikan menjadi suatu hal yang tak dapat dinafikkan keberadaannya.<sup>9</sup> Pendanaan pendidikan yang optimal dapat memastikan keberlangsungan kualitas maupun kuantitas pendidikan.<sup>10</sup> Bahwa konstitusi kita telah mengamanatkan alokasi sebesar 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan (*mandatory spending*).<sup>11</sup> Sebagai suatu diversifikasi sumber pendanaan dan penguatan pengelolaan dana pendidikan agar tidak hanya bergantung pada APBN, pada tahun 2010 pemerintah mencanangkan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang kini dikenal sebagai Dana Abadi Pendidikan. Pada perkembangannya, pemerintah juga mengalokasikan dana abadi lainnya seperti, Dana Abadi Penelitian<sup>12</sup> di tahun 2019, Dana Abadi Kebudayaan<sup>13</sup> dan Dana Abadi Perguruan Tinggi<sup>14</sup> di tahun 2020, serta Dana Abadi Pesantren<sup>15</sup> yang termasuk dalam Dana Abadi

---

<sup>5</sup> Ratna Nuraini, Langkah Nyata demi Masa Depan Bangsa, Indonesia.go.id., 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8733/langkah-nyata-demi-masa-depan-bangsa?lang=1>.

<sup>6</sup> Penurunan skor PISA tahun 2022 juga dikarenakan pandemi COVID-19 yang berdampak hampir di seluruh negara. Meski mengalami penurunan skor, namun peringkat Indonesia mengalami kenaikan. Tahun 2025 kembali dilaksanakan penilaian PISA, sehingga hasil PISA 2025 dapat menjadi cerminan kualitas sektor pendidikan beberapa tahun ini.

<sup>7</sup> OECD, *PISA 2022 Results: Factsheets - Indonesia*, OECD, Desember 2023, [https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes\\_ed6fbcc5-en/indonesia\\_c2e1ae0e-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html).

<sup>8</sup> Human Capital Project, *Indonesia Human Capital Index 2020*, World Bank, Oktober 2023, <http://www.worldbank.org/humancapital>.

<sup>9</sup> Lexy Sutansyah dan Azi Ramdani, "Pembiayaan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, dan Solusi," *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): h.222, <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.197>.

<sup>10</sup> Nurliana Hamsahtun Siregar, Murniati, dan Bahrin, "Educational Financing Management to Improve the Quality of Education", *Proceedings of the 2nd International Conference on Science, Technology, and Modern Society (ICSTMS 2020)*, September 2021, h.410, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210909.090>.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 huruf b Perpres 111/2021.

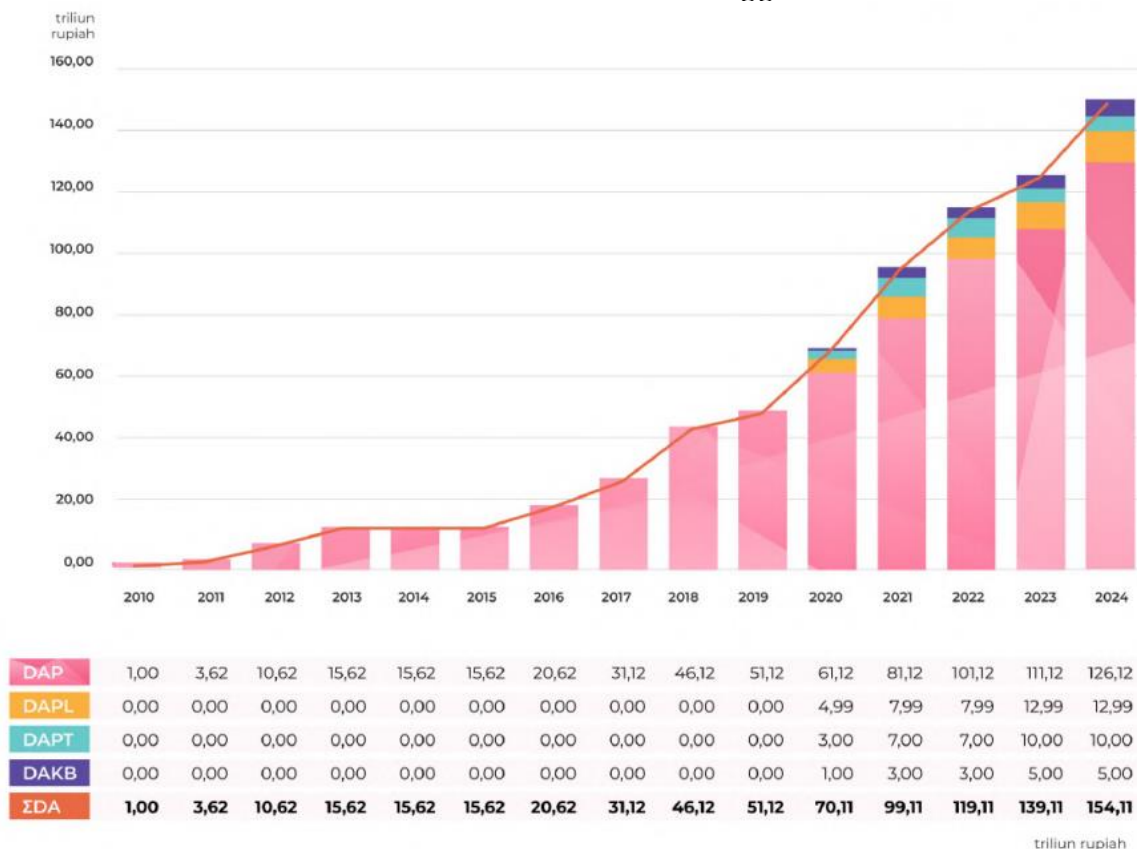
<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 huruf c Perpres 111/2021.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 dan Pasal 2 huruf d Perpres 111/2021.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 dan angka 6 Perpres 111/2021.

Pendidikan di tahun 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Perpres 111/2021). Akumulasi Dana Abadi Pendidikan mulanya hanya sebesar Rp1 triliun dan terus berkembang hingga di tahun 2024 mencapai Rp154,11 triliun.

**Gambar 1.** Akumulasi Dana Abadi hingga Tahun 2024



Sumber: Laporan Tahunan LPDP Tahun 2024

Selain sebagai pengelola dana, LPDP memiliki program layanan dan dukungan layanan untuk pelaksanaan program layanan kementerian/lembaga.<sup>16</sup> Layanan yang diselenggarakan LPDP terdiri atas layanan pengembangan dana dan layanan penyaluran dana. Layanan pengembangan dana terdiri dari 2 (dua) aktivitas utama yakni, optimalisasi Dana Abadi Pendidikan dan diversifikasi sumber pendanaan.

<sup>16</sup> Sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perpres 111/2021, kementerian/lembaga yang dimaksud terdiri atas kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi.

Sedangkan, layanan penyaluran dana terdiri dari beasiswa,<sup>17</sup> pendanaan riset,<sup>18</sup> pendanaan kegiatan kebudayaan,<sup>19</sup> dan pendanaan kegiatan perguruan tinggi.<sup>20</sup> Akan tetapi, seluruh dampak layanan tersebut belum dapat memenuhi seluruh aspek yang sangat luas dari pendidikan di Indonesia. Terdapat ruang kosong maupun hal-hal yang perlu dioptimalisasi melalui dukungan pendanaan berkelanjutan, selain hanya bertumpu pada APBN dan *endowment fund*. Mengingat negara telah memiliki *sovereign wealth fund* melalui Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA) didirikan tahun 2020<sup>21</sup> dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di tahun 2025,<sup>22</sup> terdapat suatu potensi imbal hasil atas keuangan negara yang dikelola melalui investasi untuk disalurkan terhadap layanan di bidang pendidikan.

## B. Perumusan Masalah

Merujuk pada uraian yang diutarakan di atas, penulis memandang perlu menuangkan identifikasi permasalahan menjadi sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana arah pengelolaan investasi negara di bidang pendidikan? *Kedua*, bagaimana langkah mengoptimalisasi pengelolaan investasi negara di bidang pendidikan?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan berupa:

- 
- <sup>17</sup> Program beasiswa mencakup beasiswa umum, afirmasi, *targeted*, prioritas (program *bundling*), dan kemitraan serta beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan Kementerian Agama dalam LPDP, *Kebijakan Beasiswa LPDP*, LPDP, 2025, <https://lpdp.kemenkeu.go.id/beasiswa/kebijakan-umum/>.
  - <sup>18</sup> Pendanaan terhadap Riset Inovatif Produktif (RISPRO) melalui program kompetisi, invitasi, kolaborasi internasional, dan mandatori dalam LPDP, *Riset Inovatif Produktif*, LPDP, 2025, <https://lpdp.kemenkeu.go.id/riset/kebijakan-rispros-umum/>.
  - <sup>19</sup> Dikenal pula sebagai Dana Indonesiana yang bertujuan untuk mendukung pelestarian dan pengembangan budaya sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas nasional dalam LPDP, *Laporan Tahunan LPDP Tahun 2024*, LPDP, 2025, <https://lpdp.kemenkeu.go.id/informasi/laporan-tahunan/>.
  - <sup>20</sup> Pendanaan bertujuan untuk menaikkan peringkat Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menuju *World Class University* dalam LPDP.
  - <sup>21</sup> INA didirikan berdasarkan rezim ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kini sudah tidak berlaku dan dicabut, digantikan melalui Pasal 165 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
  - <sup>22</sup> Danantara didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 3E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Sebagai informasi, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan perubahan keempat terhadap UU BUMN pada tanggal 2 Oktober 2025, namun hingga tanggal 14 Oktober 2025, UU dimaksud belum ditemukan dan belum dapat diakses publik.

- a. pendekatan konseptual, yang dalam penelitian ini menjadikan konsep *sovereign wealth fund* dan *endowment fund* sebagai dasar analisis utama dalam menganalisis isu dalam penelitian ini;
- b. pendekatan perundang-undangan, yang dalam penelitian ini menjadikan Undang-Undang mengenai Keuangan Negara, Undang-Undang mengenai BUMN, dan Undang-Undang mengenai Cipta Kerja maupun peraturan turunannya serta Peraturan Presiden mengenai Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebagai pondasi dalam menganalisis isu dalam penelitian ini; dan
- c. pendekatan komparasi, yang dalam penelitian ini menjadikan praktik *sovereign wealth fund* di negara anggota forum *sovereign wealth fund* sebagai instrumen pembandingan dalam menganalisis isu dalam penelitian ini.

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku hingga karya tulis ilmiah. Terakhir, bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, artikel, hingga media massa.

## II. PEMBAHASAN

### A. Konsep *Sovereign Wealth Fund*

*Sovereign wealth fund* (SWF) atau dana kekayaan negara merupakan suatu entitas yang didirikan negara dalam rangka mencapai diversifikasi portofolio dengan tujuan memperoleh imbal hasil tinggi, guna mengelola ketahanan kekayaan negara secara jangka panjang.<sup>23</sup> Sumber pendanaan dan tujuan pendirian SWF di tiap-tiap negara di dunia sangatlah bervariasi. Secara umum, dana SWF diperoleh dari surplus neraca perdagangan, operasi transaksi valuta asing, hasil privatisasi aset milik negara, surplus fiskal, hingga hasil ekspor sumber daya alam.<sup>24</sup> Dalam hal bentuk kelembagaan, berdasarkan The International Forum for Sovereign Wealth Fund (IFSWF), terdapat 3 (tiga) klasifikasi utama SWF yakni, *Pertama*, SWF yang dibentuk sebagai entitas hukum tersendiri dengan kedudukan hukum independent dan diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu. *Kedua*, SWF yang dibentuk sebagai perusahaan milik negara yang diatur oleh ketentuan hukum perusahaan dan/atau peraturan khusus mengenai SWF. *Ketiga*, SWF yang terdiri dari kumpulan aset yang dimiliki oleh negara, dalam hal ini pemerintah atau bank sentral, namun tidak memiliki status badan hukum tersendiri sehingga tidak berdiri sebagai entitas hukum yang otonom.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muh Farhan Ar Rusyda dan Trubus Rahardiansah, "Peran dan Kedudukan Danantara dalam Mengelola Investasi sebagai Badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF)," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no.6 (2015): h.970, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.587>.

<sup>24</sup> Brian Sukianto, "*International Investment of Sovereign Wealth Funds (SWFs): Concerns Raised by Western Countries*," *Juris Gentium Law Review* 8, no.1 (2021): h.23.

<sup>25</sup> Brian Sukianto.

SWF dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan utama mereka, terutama dalam strategi dan langkah-langkah investasi. IFSWF mengategorikan SWF ke dalam beberapa jenis:<sup>26</sup>

1. Dana Tabungan (*Savings Funds* atau *Intergenerational Funds*) yaitu, jenis dana yang dirancang untuk mengubah kekayaan dari sumber daya alam yang tidak terbarukan (seperti minyak dan gas) menjadi portofolio aset keuangan yang terdiversifikasi untuk kepentingan generasi mendatang. Dana ini memiliki jangka waktu investasi yang sangat panjang, seringkali puluhan tahun. Contoh SWF yang berasal dari Dana Tabungan adalah Government Pension Fund Global milik Norwegia.
2. Dana Stabilisasi (*Stabilisation Funds*) yaitu, dana yang diciptakan untuk melindungi anggaran negara dari volatilitas harga komoditas. SWF melalui Dana Stabilisasi mengakumulasi pendapatan selama periode harga tinggi (*boom*) dan menyalurkan dana selama periode harga rendah (*bust*), sehingga melancarkan belanja pemerintah dan menstabilkan perekonomian nasional. Contoh SWF yang berasal dari Dana Stabilisasi adalah Economic and Social Stabilization Fund milik Chili.
3. Dana Strategis/Pembangunan (*Strategic/Development Funds*) yaitu, dana yang memiliki mandat ganda berupa menghasilkan keuntungan finansial dan mendukung pembangunan ekonomi domestik serta tujuan kebijakan strategis. SWF model ini sering berinvestasi langsung di industri dalam negeri, proyek infrastruktur, atau sektor-sektor yang dianggap krusial bagi masa depan negara. Public Investment Fund (PIF) dari Arab Saudi dan Indonesia Investment Authority (INA) merupakan contoh dari dana ini.
4. Dana Hibrida (*Hybrid Funds*) yaitu, SWF yang menggabungkan lebih dari 1 (satu) tujuan. Misalnya, sebuah dana dapat berfungsi sebagai dana tabungan sekaligus dana stabilisasi. Model semacam ini umum ditemukan di negara-negara berkembang.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana, hampir semua SWF di dunia menggunakan instrumen investasi jangka panjang. Berbeda dengan institusi investasi lainnya yang mungkin menghadapi tekanan likuiditas jangka pendek, SWF memiliki kapasitas untuk menahan volatilitas pasar dan berinvestasi untuk periode puluhan tahun. Karakteristik ini memungkinkan mereka untuk memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi dan berinvestasi pada aset-aset yang kurang likuid. Tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan oleh aset-aset aman seperti, obligasi pemerintah. Kapasitas unik ini juga memungkinkan SWF untuk bertindak sebagai kekuatan stabilisasi selama periode gejolak pasar, dengan memanfaatkan peluang investasi ketika investor lain terpaksa menjual aset dengan harga murah.<sup>27</sup>

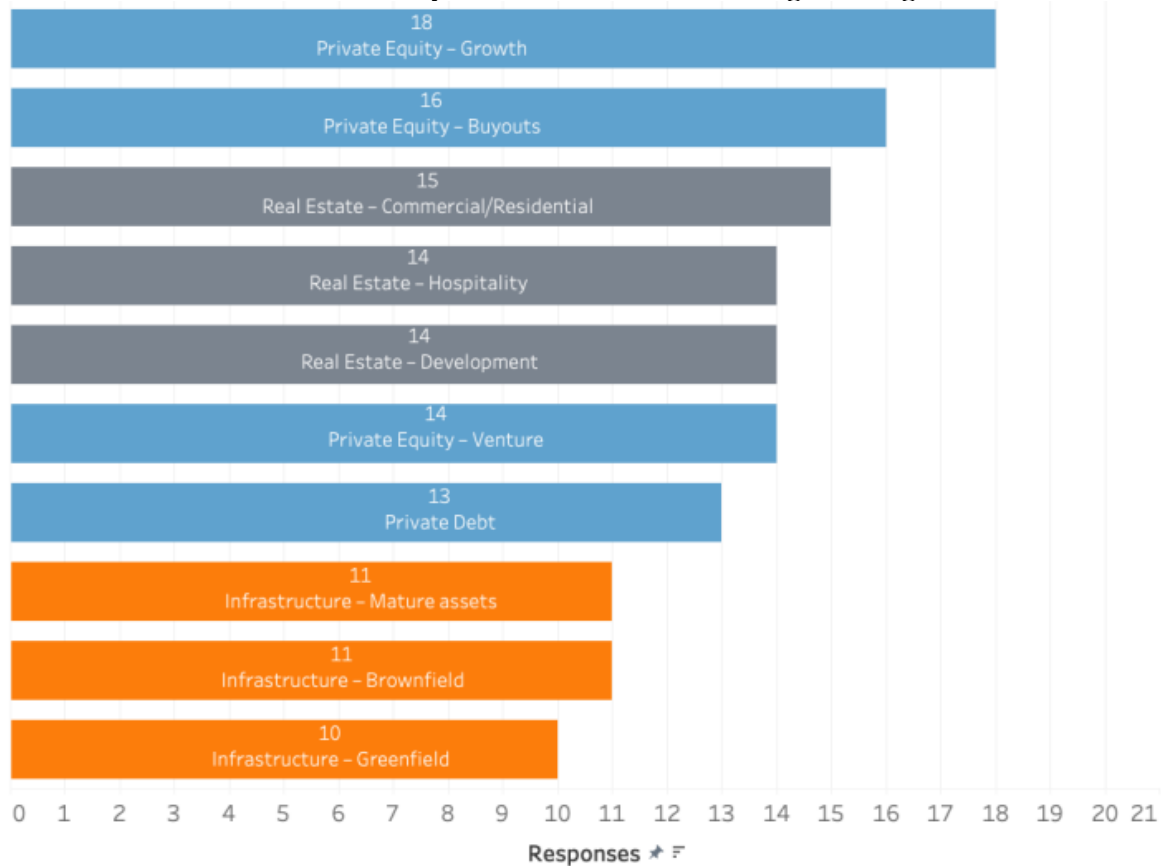
Salah satu tren paling signifikan dalam strategi SWF di banyak negara adalah peningkatan alokasi ke aset alternatif atau aset yang tidak terdaftar di bursa (*unlisted*

<sup>26</sup> International Forum of Sovereign Wealth Fund, *What is a Sovereign Wealth Fund?*, International Forum of Sovereign Wealth Fund, <https://ifswf.org/what-is-a-sovereign-wealth-fund>.

<sup>27</sup> Stephen L. Jen, *Sovereign Wealth Fund Investment Strategies: Complementing Central Bank Investment Strategies* (Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2010) h.127.

assets). SWF di beberapa negara secara bertahap beralih dari portofolio tradisional yang hanya terdiri dari saham publik dan obligasi, menuju alokasi yang lebih besar pada ekuitas swasta, real estat, infrastruktur, dan kredit swasta (*private credit*)<sup>28</sup>

**Gambar 2.** Hasil Survey *Asset Allocation* dari Negara-Negara IFSWF



Sumber: IFSWF/Pwc Partnership Survey, 2021

Beberapa contoh dari negara anggota IFSWF dalam menyusun komposisi portofolio investasi mereka sesuai dengan mandat dan tujuan nasional masing-masing sebagai berikut:

1. Government Pension Fund Global (GPF) Norwegia merupakan contoh murni dari Dana Tabungan yang bertujuan mengubah kekayaan minyak menjadi portofolio keuangan yang terdiversifikasi secara global untuk memastikan keberlanjutan antargenerasi. Dana ini bertujuan agar perekonomian di Norwegia menjadi lebih independen. GPF memiliki saham di lebih dari 8.700 perusahaan di seluruh dunia, yang setara dengan sekitar 1,5% dari seluruh saham perusahaan

<sup>28</sup> International Forum of Sovereign Wealth Funds, *Partnering for Success: Sovereign Wealth Fund Investments in Private Markets*, International Forum of Sovereign Wealth Funds, International Forum of Sovereign Wealth Funds, <https://ifswf.org/publication/partnering-success-sovereign-wealth-fund-investments-private-markets> h.5.

- yang terdaftar secara global. Alokasi yang lebih kecil diberikan untuk pendapatan tetap (sekitar 25-27%) dan aset riil seperti real estat dan infrastruktur energi terbarukan yang tidak terdaftar (sekitar 3-5%).<sup>29</sup>
2. China Investment Corporation (CIC) sebagai dana non-komoditas, didirikan untuk mendiversifikasi cadangan devisa Tiongkok yang sangat besar dan mencari imbal hasil yang lebih tinggi. CIC beroperasi dengan rentang waktu pengelolaan investasi selama 10 tahun. CIC memiliki portofolio dengan alokasi signifikan pada aset alternatif. Pada akhir tahun 2023, alokasi asetnya meliputi saham publik (33,1%), pendapatan tetap (16,5%), aset alternatif (48,3%), dan kas/lainnya (2,1%).<sup>30</sup>
  3. Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) merupakan salah satu SWF tertua dan terbesar di dunia yang didanai oleh cadangan minyak, ADIA menerapkan strategi investasi jangka panjang yang sangat terdiversifikasi dan berfokus pada penciptaan tingkat imbal hasil yang sesuai dengan situasi pasar. Berdasarkan laporan tahun 2024, rentang aset alokasi utamanya meliputi saham negara maju (32-42%), saham negara berkembang (7-15%), ekuitas swasta (12-17%), real estat (5-10%), dan infrastruktur (2-7%). Secara geografis, portofolio mayoritas ditempatkan di negara-negara Amerika Utara (45-60%).<sup>31</sup>
  4. Singapura mengoperasikan 2 (dua) SWF yang masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Kedua SWF tersebut, yaitu:
    - a. GIC Private Limited merupakan SWF yang bertugas mengelola cadangan devisa Singapura untuk jangka panjang. Portofolio GIC sangat terdiversifikasi secara global dan hanya berinvestasi pada aset internasional. Sejak Maret 2025, alokasinya secara garis besar adalah ekuitas (51% gabungan publik dan swasta), pendapatan tetap (26%), dan aset riil (23%).<sup>32</sup>
    - b. Temasek Holdings menjadi SWF yang lebih mirip seperti perusahaan induk investasi pemerintah daripada SWF pada umumnya. Portofolionya lebih terkonsentrasi dengan kepemilikan saham yang signifikan di banyak perusahaan terkemuka Singapura seperti, Bank DBS dan maskapai Singapore Airlines. Sejak Maret 2025, portofolio Temasek memiliki alokasi yang sangat tinggi pada aset tidak terdaftar (49%), dengan eksposur signifikan ke Singapura (27% dari eksposur aset dasar) dan Asia.<sup>33</sup>

SWF di Indonesia terdapat INA, lembaga yang diberikan kewenangan khusus atau *sui generis* untuk mengelola investasi negara. Sebagai SWF di Indonesia menyelenggarakan investasi dengan menggunakan skema penyertaan modal, baik

---

<sup>29</sup> David Downs, *The Portfolio Construction of the Norwegian Sovereign Wealth Fund: Strategy, Structure, and Stewardship*, Duke, 2025, <https://sites.duke.edu/finance/2025/06/06/norwegian-sovereign-wealth-fund/>.

<sup>30</sup> China Investment Cooperation, *Annual Report 2023*, China Investment Cooperation, <https://www.china-inv.cn/chinainven/xhtml/Media/2023EN.pdf> h.34.

<sup>31</sup> Abu Dhabi Investment Authority, *Adia Review 2024*, Abu Dhabi Investment Authority, 2025, <https://www.adia.ae/en/publications/news/adia-has-published-its-2024-adia-review>.

<sup>32</sup> Government of Singapore Investment Cooperation, *GIC Report 2024/2025*, Government of Singapore Investment Cooperation, <https://www.gic.com.sg/our-portfolio/gic-reports/> h.14.

<sup>33</sup> Temasek, *Our Portfolio*, Temasek, <https://www.temasek.com.sg/en/our-investments/our-portfolio#liquidity>.

yang telah *listed*<sup>34</sup> maupun *non-listed*<sup>35</sup> di beberapa sektor bisnis, utamanya terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>36</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi menyebutkan bahwa INA bertugas untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, serta mengevaluasi investasi yang dilakukan oleh INA. Kewenangan yang telah diberikan kepada INA menjadikannya sebagai SWF yang memiliki kewenangan penempatan dana dalam semua jenis instrumen keuangan. Selain itu, INA dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan LPDP yang merupakan salah satu jenis dana perwalian (*trust fund*).<sup>37</sup>

Berbeda dengan INA, Danantara sebagai super *holding* BUMN, dibentuk bertujuan sebagai strategi pengelolaan aset negara secara terintegrasi dan berkelanjutan. Danantara memiliki cakupan yang lebih luas sebagai SWF Indonesia yang baru dengan memiliki dana kelolaan yang sangat masif dari BUMN, termasuk anak perusahaan BUMN. Kondisi pada INA dan Danantara sebetulnya menunjukkan perbedaan konsep perolehan dana SWF pada negara-negara dunia. Mengingat, kedua SWF di Indonesia tersebut tidak mengelola dana surplus keuangan negara. Namun, regulasi, tata kelola, dan kelembagaan antara INA dan Danantara sama-sama mengarah kepada SWF.

## B. Pengelolaan *Endowment Fund* di Bidang Pendidikan

Sejalan dengan misinya menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan antar generasi, LPDP berinvestasi pada instrumen jangka pendek dan jangka panjang yang kemudian imbal hasilnya digunakan untuk beragam layanan. Dalam pengelolaan investasinya, LPDP menjalankan bisnis proses yang baik didukung oleh *Good Corporate Governance* yang teruji dan andal. LPDP menggunakan imbal hasil di tahun berjalan untuk membiayai beragam layanannya. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mencari instrumen investasi yang cocok dengan karakteristik kebutuhan layanan jangka pendek. Untuk itu, LPDP telah memiliki *Strategic Asset Allocation*, salah satunya bertujuan untuk mengatur porsi belanja jangka pendek dengan level minimal tertentu. Komposisi portofolio investasi LPDP sebagian besar berasal dari obligasi negara dan deposito.

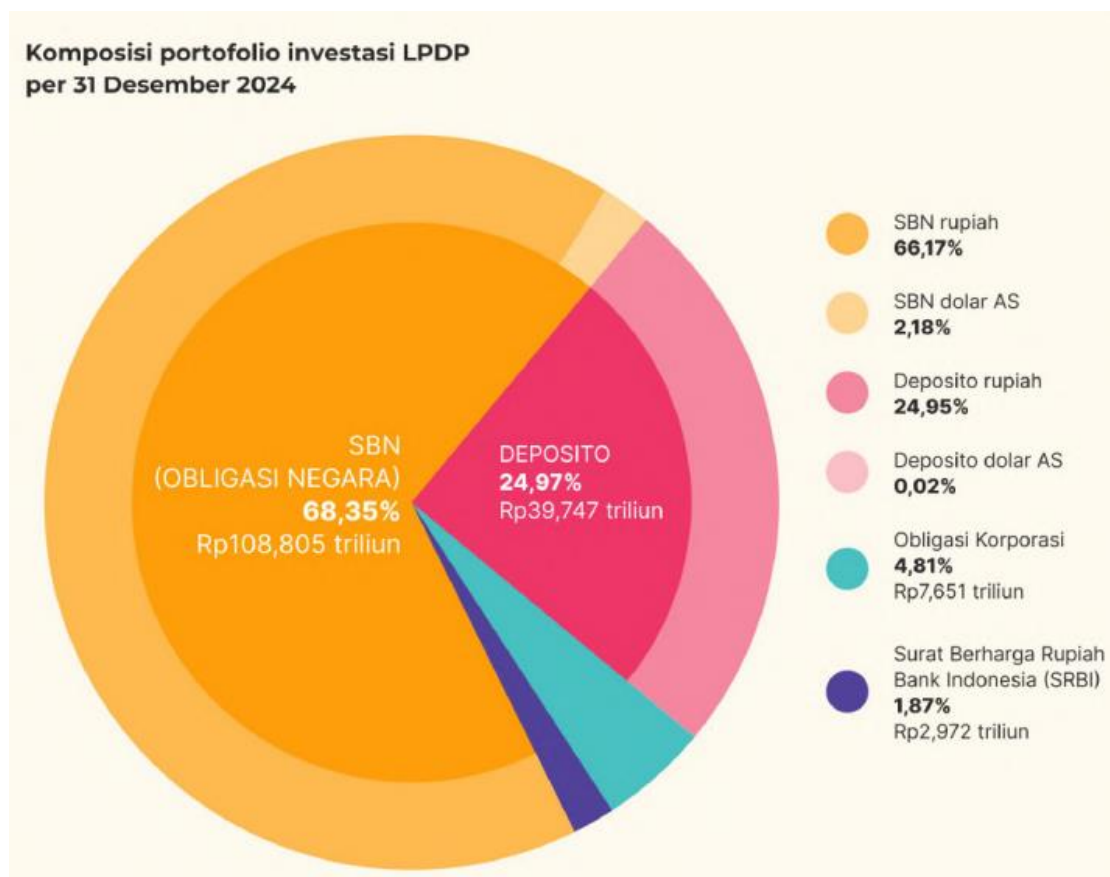
---

<sup>34</sup> *Listed* adalah perusahaan dengan instrumen investasi berupa saham yang diperdagangkan secara bebas di bursa saham, seperti Bursa Efek Indonesia.

<sup>35</sup> *Non-Listed* adalah perusahaan yang tidak mendaftarkan saham perusahaannya di bursa saham.

<sup>36</sup> Justin Alexander Halim, "Indonesia's New Sovereign Wealth Fund: When Strategic Development Converges with Stabilization," *The Lawpreneurship Journal* 1, no.1 (2021): h.10, <https://doi.org/10.21632/tlj.1.1.1-29>.

<sup>37</sup> Sriyana, dkk. *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2025) h.74.

**Gambar 3.** Komposisi Portofolio Investasi LPDP hingga 31 Desember 2024

Sumber: Laporan Tahunan LPDP Tahun 2024

Dengan berjalannya waktu pengelolaan investasi LPDP hingga saat ini, LPDP terbilang sangat aktif berinvestasi pada instrumen investasi jangka panjang.<sup>38</sup> Melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PP 23/2005), sebetulnya membatasi jenis investasi bagi badan layanan umum, termasuk LPDP, hanya pada instrumen investasi jangka pendek. Suatu investasi harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan apabila akan melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal, kepemilikan obligasi untuk masa jangka panjang, investasi langsung, atau jenis investasi langsung lainnya.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Sebagai bagian dari strategi investasi jangka panjang, LPDP juga melakukan diversifikasi investasi melalui pembelian obligasi denominasi valuta asing (*global bond/sukuk*). Langkah ini melengkapi strategi *shifting* pada *core investment*, memperkuat daya tahan investasi, serta meningkatkan kontribusi LPDP dalam ekosistem pendanaan berkelanjutan untuk pendidikan dan pembangunan nasional.

<sup>39</sup> Lihat Pasal 19 PP 23/2005.

Sesuai dengan strategi investasi jangka panjang, LPDP diarahkan pada instrumen pasar yang lebih stabil, khususnya obligasi guna menjaga imbal hasil yang berkelanjutan dan risiko yang terukur. Hingga 31 Desember 2024, portofolio investasi LPDP menunjukkan dominasi kuat pada instrumen obligasi negara yakni sebesar 68,35% (Denominasi Rupiah dan Dolar AS), yang mencerminkan fokus lembaga pada *core investment* dengan profil risiko rendah namun tetap optimal. Strategi investasi LPDP ini membuahkan hasil positif, tercermin dari realisasi PNB<sup>40</sup> per 31 Desember 2024 mencapai Rp11,28 triliun atau 108,46% dari target DIPA<sup>41</sup> 2024 sebesar Rp10,40 triliun sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran LPDP tahun 2024.

Berdasarkan kebutuhan layanan yang semakin tinggi dan meluas, maka ke depannya LPDP dapat melakukan diversifikasi investasi ke jenis-jenis aset lainnya seperti saham, *private placement*, investasi dalam denominasi valuta asing, dan bentuk investasi lainnya. Namun, dalam praktiknya hal ini masih mengalami tantangan, mengingat dana kelolaan LPDP berasal dari APBN yang masih sangat sensitif dengan beban keuangan negara atau sederhananya bahwa investasi oleh lembaga pemerintah tidak boleh merugi. Kerugian yang timbul dalam investasi pun harus diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian kerugian negara.<sup>42</sup>

### C. Optimalisasi Pengelolaan Investasi Negara di Bidang Pendidikan

Keberadaan LPDP sebagai pengelola *endowment fund* dalam mendukung pendanaan pendidikan berkelanjutan tidak dapat berdiri sendiri. Terdapat potensi kerja sama yang dapat dilakukan LPDP dengan SWF seperti INA dan/atau Danantara. Kerja sama tersebut dapat berupa *co-investment/joint partnership* (ekuitas) hingga menjadi pembeli obligasi/investor (surat utang). Imbal hasil yang didapatkan dari investasi yang dilakukan secara langsung akan digunakan oleh LPDP untuk membiayai layanan pendidikan. Saat ini, sebetulnya LPDP telah aktif membeli obligasi BUMN, termasuk anak perusahaan BUMN, dengan *rating* tertentu, sehingga hal tersebut akan tetap dapat dilakukan. Sedangkan, untuk investasi pada efek berbasis ekuitas belum dilakukan sampai saat ini karena belum adanya proyek yang ditawarkan kepada LPDP dan belum diaturnya terkait beban keuangan negara yang bisa saja timbul dari investasi tersebut.

Postur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2026 untuk pendidikan direncanakan sebesar Rp757.822,3 miliar. Jumlah tersebut akan dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD), hingga investasi pemerintah pada pos pembiayaan. Terhadap anggaran pendidikan melalui BPP akan membiayai berbagai program prioritas pemerintah. Direncanakan anggaran sebesar Rp467.462,5 miliar akan digelontorkan untuk mewujudkan program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan, hingga Revitalisasi Sekolah.<sup>43</sup> Maka, menyerahkan seluruh urusan

<sup>40</sup> Penerimaan Negara Bukan Pajak.

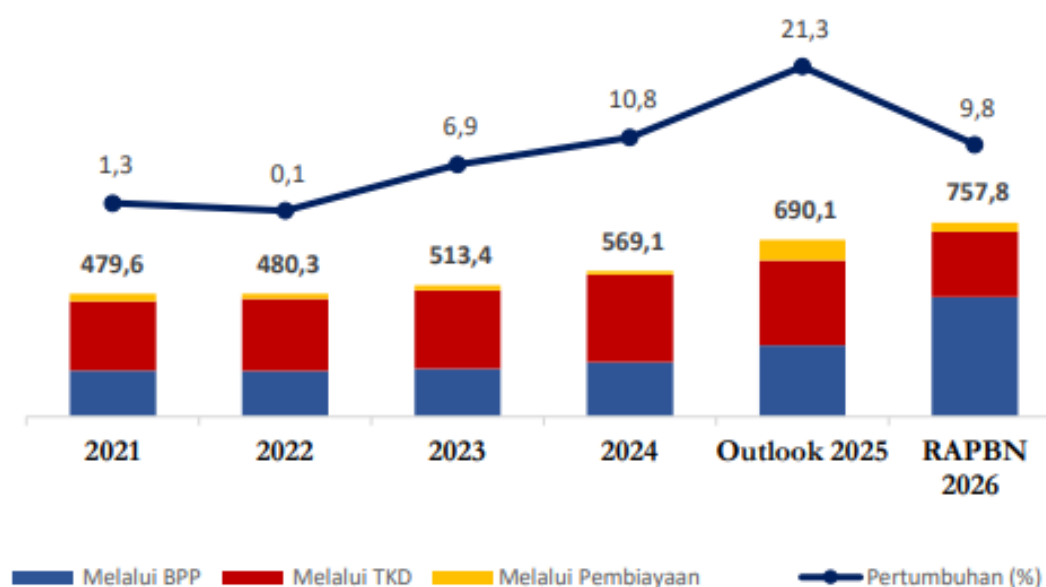
<sup>41</sup> Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

<sup>42</sup> Lihat Pasal 24 PP 23/2005.

<sup>43</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*, Pemerintah Republik Indonesia, 2025.

pendidikan melalui APBN saja tidak akan cukup, sehingga memerlukan dukungan pendanaan lainnya untuk mempercepat peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan secara signifikan.

**Gambar 4.** Perkembangan Anggaran Pendidikan Sejak Tahun 2021 s.d. 2026 (dalam triliun rupiah)



Sumber: Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Sebagai pengembangan Danantara, SWF terbaru Indonesia tersebut merilis sebuah produk pembiayaan melalui Patriot Bonds dengan *rating* AAA dari Fitch Rating Indonesia. Obligasi Patriot Bonds tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi dan kemandirian pembiayaan nasional melalui *blended finance* antara pemerintah dan sektor swasta. Penawaran terhadap Patriot Bonds bersifat *private placement*, bukan sebagai penawaran publik. Patriot Bonds sendiri memiliki kupon sebesar 2 (dua) persen yang berada di bawah *yield* obligasi pemerintah Indonesia dengan tenor yang sama. Penggunaan dana obligasi tersebut diperuntukkan untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional, termasuk saat ini akan difokuskan mendorong sektor energi terbarukan.<sup>44</sup>

Dalam hal penerbitan produk seperti Patriot Bonds yang menitikberatkan untuk mendorong sektor energi berkelanjutan di Indonesia, SWF di Indonesia, khususnya Danantara, diharapkan dapat menerbitkan surat utang lainnya atau melakukan diversifikasi instrumen investasi dengan tujuan yang spesifik bagi pendidikan untuk mendukung pendanaan pendidikan selain melalui APBN maupun *endowment fund*.

<sup>44</sup> I Kadek Adi Dwipayana, Sejumlah Ekonom Sebut Patriot Bonds dari Danantara Lebih dari Sekadar Obligasi, Tempo, 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/sejumlah-ekonom-sebut-patriot-bonds-dari-danantara-lebih-dari-sekadar-obligasi-2069082>.

Tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dari pengelolaan dana oleh SWF Indonesia akan digunakan untuk akses dan partisipasi pendidikan; kesejahteraan dan kualitas guru dan dosen; serta riset dan teknologi. Selain itu, penyaluran dana juga harus menitikberatkan pada pemerataan pendidikan bagi masyarakat di daerah 3T,<sup>45</sup> daerah di Indonesia Timur, masyarakat prasejahtera, hingga penyandang disabilitas. Imbal hasil dari pengelolaan dana oleh SWF Indonesia maupun oleh LPDP akan membantu kebutuhan dana pendidikan dari hulu ke hilir melalui manfaat dari kerja sama pengelolaan dana SWF Indonesia dengan LPDP.

Optimalisasi pendanaan di bidang pendidikan melalui SWF bukan menjadi satu-satunya harapan tunggal. SWF dengan dana kelolaan yang amat tinggi serta kewenangan penempatan dana yang lebih variatif, utamanya pada Danantara yang bukan berasal dari surplus keuangan negara, harus mengarusutamakan tata kelola yang baik.<sup>46</sup> Keberlanjutan SWF sama seperti bentuk investasi lainnya, bahwa kinerja suatu produk maupun kelembagaan dilihat dari sisi transparansi, akuntabilitas, tata kelola, dan regulasi yang tepat.<sup>47</sup> Sama halnya terhadap LPDP sebagai pengelola dana *endowment fund*, agar terus memperhatikan tata kelola yang baik.

### III. KESIMPULAN

Dalam rangka membangun talenta manusia Indonesia yang sejahtera dan kompeten melalui pendanaan pendidikan yang berkelanjutan, Penulis merekomendasikan agar arah pengelolaan investasi negara di bidang pendidikan menjadi sebagai berikut: *Pertama*, urgensi bagi SWF di Indonesia mendukung pendanaan pendidikan dan berkolaborasi dengan lembaga *endowment fund* di bidang pendidikan. Instrumen investasi jangka panjang melalui SWF menjadi penting sebagai belanja jangka panjang. Pendanaan jangka panjang melalui SWF dibutuhkan untuk akses dan partisipasi pendidikan; kesejahteraan dan kualitas guru dan dosen; serta riset dan teknologi. *Kedua*, penguatan lembaga *endowment fund* di bidang pendidikan diperlukan untuk instrumen investasi jangka pendek guna belanja jangka pendek dan menengah di bidang pendidikan. Penguatan terhadap layanan yang telah ada saat ini menjadi penting, utamanya terhadap masyarakat di daerah 3T, daerah di Indonesia Timur, masyarakat prasejahtera, hingga penyandang disabilitas. Kehidupan yang layak akan tercapai bilamana keberlangsungan pendidikan warga negara secara kualitas dan kuantitas telah terpenuhi melalui dukungan pendanaan pendidikan berkelanjutan melalui SWF dan *endowment fund*.

---

<sup>45</sup> Daerah 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pada LPDP, lebih dikenal sebagai daerah afirmasi.

<sup>46</sup> Rahma Hidayati, dkk., "Dampak Danantara terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pembangunan di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 21, no.2 (2025): h. 203, <https://doi.org/10.35384/jkp.v21i2.695>.

<sup>47</sup> R. Edi Sewandono dan Satya Arinanto, "Pendekatan dan Pengaturan Hukum Daya Anagata Nusantara terhadap Prinsip dan Praktik Terbaik Sovereign Wealth Fund," *KONSEPSI: Knowledge on Sustainable Economy, Public Policy & Social Innovations* 1, no.1 (2025): h.2-3.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Dhabi Investment Authority, *Adia Review 2024*, Government of Singapore Investment Cooperation, 2025, <https://www.adia.ae/en/publications/news/adia-has-published-its-2024-adia-review>.
- China Investment Cooperation, *Annual Report 2023*, China Investment Cooperation, <https://www.china-inv.cn/chinainven/xhtml/Media/2023EN.pdf>.
- Downs, David, *The Portfolio Construction of the Norwegian Sovereign Wealth Fund: Strategy, Structure, and Stewardship*, Duke, 2025, <https://sites.duke.edu/finance/2025/06/06/norwegian-sovereign-wealth-fund/>.
- Dwipayana, I Kadek Adi, *Sejumlah Ekonom Sebut Patriot Bonds dari Danantara Lebih dari Sekadar Obligasi*, Tempo, 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/sejumlah-ekonom-sebut-patriot-bonds-dari-danantara-lebih-dari-sekadar-obligasi-2069082>.
- Government of Singapore Investment Cooperation, *GIC Report 2024/2025*, Government of Singapore Investment Cooperation, <https://www.gic.com.sg/our-portfolio/gic-reports/>.
- Halim, Justin Alexander. "Indonesia's New Sovereign Wealth Fund: When Strategic Development Converges with Stabilization," *The Lawpreneurship Journal* 1, no.1 (2021): 1-29, <https://doi.org/10.21632/tlj.1.1.1-29>.
- Human Capital Project, *Indonesia Human Capital Index 2020*, World Bank, Oktober 2023, <http://www.worldbank.org/humancapital>.
- International Forum of Sovereign Wealth Funds, *Partnering for Success: Sovereign Wealth Fund Investments in Private Markets*, International Forum of Sovereign Wealth Funds, <https://ifswf.org/publication/partnering-success-sovereign-wealth-fund-investments-private-markets>.
- International Forum of Sovereign Wealth Funds, *What is a Sovereign Wealth Fund?*, International Forum of Sovereign Wealth Funds, <https://ifswf.org/what-is-a-sovereign-wealth-fund>.
- Kant, Immanuel. *Kant on Education (Über Pädagogik)*, translator by Annette Churton, introduction by C.A. Foley Rhys Davids. Boston: D.C. Heath and Co., 1900.
- LPDP, *Kebijakan Beasiswa LPDP*, LPDP, 2025, <https://lpdp.kemenkeu.go.id/beasiswa/kebijakan-umum/>.
- LPDP, *Laporan Tahunan LPDP Tahun 2024*, LPDP, 2025, <https://lpdp.kemenkeu.go.id/informasi/laporan-tahunan/>.
- LPDP, *Riset Inovatif Produktif*, LPDP, 2025, <https://lpdp.kemenkeu.go.id/riset/kebijakan-rispros-umum/>.

- 
- Nuraini, Ratna. *Langkah Nyata demi Masa Depan Bangsa*, Indonesia.go.id., 2024, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8733/langkah-nyata-demi-masa-depan-bangsa?lang=1>.
- OECD, *PISA 2022 Results: Factsheets - Indonesia*, OECD, Desember 2023, [https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes\\_ed6fbcc5-en/indonesia\\_c2e1ae0e-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html).
- Palguna, I D. G., dan Bima Kumara Dwi Atmaja. "Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 350-370, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026*, Pemerintah Republik Indonesia, 2025.
- Rahma Hidayati, dkk., "Dampak Danantara terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pembangunan di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 21, no.2 (2025): 197-208, <https://doi.org/10.35384/jkp.v21i2.695>.
- Rusyda, Muh Farhan Ar, dan Trubus Rahardiansah. "Peran dan Kedudukan Danantara dalam Mengelola Investasi sebagai Badan *Sovereign Wealth Fund* (SWF)," *Jurnal Riset Multidisplin Edukasi* 2, no.6 (2015): 969-988, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.587>.
- Sewandono, R. Edi, dan Satya Arinanto. "Pendekatan dan Pengaturan Hukum Daya Anagata Nusantara terhadap Prinsip dan Praktik Terbaik *Sovereign Wealth Fund*," *KONSEPSI: Knowledge on Sustainable Economy, Public Policy & Social Innovations* 1, no.1 (2025): 1-25.
- Siregar, Nurliana Hamsahtun, Murniati, dan Bahrin, "Educational Financing Management to Improve the Quality of Education", *Proceedings of the 2nd International Conference on Science, Technology, and Modern Society (ICSTMS 2020)*. Online, September 2021, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210909.090>.
- Sriyana, dkk. *Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2025.
- Stephen L. Jen, *Sovereign Wealth Fund Investment Strategies: Complementing Central Bank Investment Strategies*, Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2010.
- Sukianto, Brian. "International Investment of *Sovereign Wealth Funds* (SWFs): Concerns Raised by Western Countries," *Juris Gentium Law Review* 8, no.1 (2021): 20-38.

Sutansyah, Lexy, dan Azi Ramdani. "Pembiayaan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, dan Solusi," *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 221-226, <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.197>.

Temasek, *Our Portfolio*, Temasek, <https://www.temasek.com.sg/en/our-investments/our-portfolio#liquidity>.

This page intentionally left  
blank